RASAKAN

Tak Perlu Panik

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada pemerintah terkait utang yang terus meningkat selama pandemi Covid-19. BPK khawatir karena Per Mei 2021, utang pemerintah Indonesia meningkat 22 persen menjadi Rp6.418,15 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp5.258,7 triliun.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, rasio defisit dan utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, namun trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.

BPK menyebutkan indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) antara lain rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.

Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Selain itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.

Namun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta publik tidak perlu panik berlebihan merespons utang pemerintah yang meningkat selama pandemi sebagaimana yang dikhawatirkan BPK. Sebab menurut Said, jumlah utang tersebut masih dalam posisi aman dari batas atas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 yaitu sebesar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Saya kira pemerintah di mana pun tidak akan mau terbelit utang dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan," kata Said.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan, utang pemerintah memang naik signifikan. Tetapi utang itu tidak akan sampai pada tahap gagal bayar.

Riefky mengakui, Indonesia tidak pernah memiliki utang secara rasio PDB setinggi ini. Namun jika dibandingkan banyak Negara, Indonesia memang jauh lebih aman. Meskipun begitu, utang pemerintah harus dikelola secara sangat hati-hati dan disiplin, serta publik juga harus terus memantau pengelolaan utang pemerintah tersebut. Selama utang pemerintah digunakan untuk kebutuhan yang produktif seperti menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Membangun Purworejo Berdaya Saing

RH AGUS BASTIAN SE MM

PURWOREJO Adalah kabupaten dengan berbagai potensi. Terdapat topografi beragam pada wilayah seluas 1.034 kilometer persegi itu. Terdapat garis pantai sepanjang 24 kilometer dan dua gugusan bukit di sisi utara dan timur wilayah itu, Serayu Selatan serta Menoreh.

Inti kawasan itu adalah hamparan datar. Gambaran geografi itu menjadikan Purworejo kawasan yang subur. Kabupaten itu dikenal sebagai salah satu lumbung beras penyangga ketahanan pangan di Jawa Tengah, bahkan secara nasional. Mengingat, sebagian besar yang dihasilkan Purworejo dikirim ke Jakarta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat ibu kota.

Ditilik dari sisi infrastruktur, Purworejo juga kabupaten yang strategis. Letaknya berada di tengah 'perdagangan', yakni akses ke Jawa Tengah bagian Barat, ke timur menuju Yogyakarta, dan titik temu jalur utara lewat Magelang.

Nilai strategis Purworejo bahkan sudah menjadi lirik Pemerintah Hindia Belanda yang memiliki keinginan untuk memindahkan ibu kotanya dari Batavia ke kota itu pada abad ke-19. Letak Purworejo yang di pedalaman Pulau Jawa sehingga dinilai aman dari serangan bangsa asing, menjadi salah satu alasan Belanda ingin memindahkan pemerintahannya.

Meski pada akhirnya rencana itu batal karena pasca Perang Diponegoro, situasi Pulau Jawa minim pergolakan fisik. Belanda lebih memilih Kota Bandung dibandingkan Purworejo, karena hawanya lebih sejuk.

Namun, ide Belanda memindahkan pemerintahannya ke Purworejo membuat bangsa itu membangun berbagai infrastruktur. Gedung perkantoran, markas militer, jalan raya, dan jalur kereta api, dibangun di Kabupaten Purworejo. Bangunan itu bertahan dan terawat hingga saat ini, dan berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata heritage.

Gugusan Perbukitan Menoreh dan Serayu Selatan pun menawarkan keindahan bagi para penikmat alam. Ada banyak spot untuk menyaksikan pemandangan matahari terbit dan sebagian besar telah dikembangkan masyarakat menjadi destinasi wisata desa.

Berbagai potensi itu kini terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo di bawah kepemimpinan Bupati RH Agus Bastian SE MM. Bupati meramu berbagai program pembangunan jangka pendek, menengah, dan

Bupati Purworejo Agus Bastian menerima kunjungan Menparekraf Sandiagra Uno di Glamping de Loano, Desa Sedayu Kecamatan Loano.

panjang untuk memajukan Kabupaten Purworejo.

Bukan tanpa alasan Agus Bastian merumuskan rangkaian kebijakan itu. "Sebab kami dituntut untuk bisa menjawab tantangan, untuk dapat memanfaatkan peluang yang saat ini sudah tersedia," tutur Agus Bastian, kepada Minggu Pagi.

Purworejo memang sudah punya segudang potensi. Namun, kini potensi itu semakin beragam, terutama setelah pemerintah pusat membangun Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Bandara itu dirasa lebih dekat dari Purworejo dibandingkan pusat Kota Yogyakarta.

Tidak hanya BIY, pemerintah juga memiliki target menyelesaikan pembangunan Bendungan Bener yang tapak atau bangunan intinya ada di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo. Pemerintah tidak main-main dengan megaproyek triliunan rupiah itu. Bahkan Presiden Joko Widodo menetapkan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Purworejo masuk ke dalam Kawasan Otoritatif Borobudur. Kebijakan itu sejalan dengan misi pemerintah membangun kawasan penyangga pariwisata Candi Borobudur. "Candi Borobudur ditetapkan masuk sebagai sepuluh Bali Baru, atau Destinasi Super Prioritas. Kebetulan dari 309 hektare kawasan otoritatif yang ditetapkan dalam Perpres 46 Tahun 2017, sebagian besar berada di Kecamatan Loano, Purworejo," terang Bupati.

Menurutnya, masyarakat Purworejo harus bisa menangkap berbagai peluang itu. Masyarakat, katanya, tidak boleh hanya menjadi

penonton dari berbagai kemajuan itu. "Upaya menangkap peluang seharusnya cukup mudah dilakukan saat ini, mengingat teknologi informasi yang sudah sangat maju. Aksi mengenalkan dan menjual potensi lokal, bisa dilakukan dari genggaman tangan," ucapnya.

Namun, pemerintah kabupaten tidak melepaskan masyarakat untuk bergerak sendiri memanfaatkan berbagai peluang itu. Agus Bastian mengatakan, seluruh potensi yang dimiliki kabupaten dan dinamika perkembangan kawasan dirangkum dalam visi Purworejo Berdaya Saing Tahun 2025.

Kabupaten Purworejo, katanya, harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam bidang sumber daya manusia, pertanian, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan infrastruktur. "Semua itu harus dicapai pada tahun 2025 mendatang," ucapnya.

Tahun 2025, kata Bupati, menjadi target karena kawasan Jawa Tengah bagian Selatan dan Yogyakarta akan berkembang pesat dalam kurun empat tahun mendatang. "Kelak semua infrastruktur yang menjadi target pembangunan pemerintah pusat sudah terwujud, saat itulah masyarakat harus sudah siap dengan keunggulan yang mereka miliki," tuturnya.

Langkah konkret untuk mengajawantahkan visi tersebut antara lain dengan mengkaji ulang Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Pemkab Purworejo mengusulkan review Raperda RTRW dengan mengakomodasi perkembangan kawasan.

Tahap demi tahap ditempuh dengan tetap menjalin sinergi bersama anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Jalan menuju terbitnya

Perda RTRW yang baru pun terbuka lebar setelah draf aturannya disetujui DPRD dan tinggal menunggu persetujuan Gubernur Jawa Tengah.

Salah satu poin dalam rencana aturan tata ruang itu, katanya, adalah pengembangan wilayah Selatan-Selatan sebagai kawasan industri. Konsep itu sejalan dengan keberadaan bandara dan adanya rencana pemerintah membangun jalan tol Yogyakarta - Cilacap dalam beberapa tahun ke depan.

Agus Bastian juga memproyeksikan wilayah Selatan itu menjadi Border City atau kota perbatasan, dan kawasan Aerotropolis sebagai penyangga BIY. "Jika tidak dipersiapkan payung hukumnya, nanti kita sendiri yang kerepotan. Adanya regulasi RTRW baru kelak juga menjadi jaminan bagi investor agar mau menanamkan modalnya di Purworejo," ujarnya.

Pemkab Purworejo juga mulai membangun kawasan strategis pariwisata, khususnya di wilayah pesisir. Pantai Jatimalang disulap dan branding ulang dengan nama Pantai Dewa Ruci. Secara umum, Bupati memang ingin membranding ulang Romansa Purworejo atau Tahun Kunjungan Wisata Purworejo 2020.

Konsep yang sempat terhambat lantaran Indonesia dihantam pandemi covid-19. Purworejo, katanya, harus membangun konsep wisata baru dengan memanfaatkan potensi kota lama, bentang alam Menoreh dan Serayu Selatan, serta keunggulan seni budaya yang dimiliki.

Untuk menggapai visi, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang lengkap dan prima. "Akses jalan misalnya, kami harus bisa menjaga kondisinya agar selalu bagus dan membangun berbagai akses penting. Sumbernya tidak hanya dari APBD, kami juga berupaya mendapat dukungan dari pusat dan provinsi," paparnya.

Bupati menegaskan, tantangan terbesar dalam mempersiapkan diri menuju Purworejo Berdaya Saing Tahun 2025 adalah kesiapan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan yang diprogramkan pemerintah bakal sulit terwujud jika masyarakat tidak bergerak seirama.

Maka, katanya, pembangunan sumber daya manusia pun menjadi salah satu target utama. "Masyarakat Purworejo harus memiliki kompetensi keahlian dan keilmuan, tapi tetap tidak menanggalkan nilai-nilai religi. Saya meyakini masyarakat Purworejo memiliki militansi dan etos kerja tinggi," tandasnya.

(Jarot Sarwosambodo)

PELACAKAN KONTAK ERAT PASIEN COVID-19

Polres Karanganyar Rekrut Mitra Polri

Stakeholder tracing program penanggulangan Covid-19 di Karanganyar.

JUMLAH pelacak atau tracer kontak erat pasien Covid-19 di Kabupaten Karanganyar terus ditambah. Setelah memberi pelatihan tracer kepada 177 Babinkamtibmas, Polres Karanganyar juga merekrut relawan dari Senkom Mitra Polri.

Kasat Binmas Mitra Karanganyar AKP Lukman Tri Novianto menerangkan, alasan

anggota Senkom Mitra Polri dilibatkan menjadi tracer karena para mitra Polri berkomitmen kuat mendukung program kepolisian. Sekarang fokus meneken penularan Covid-19. Selain itu, Senkom Mitra Polri bekerja tanpa pamrih.

"Ini pertama kali menggandeng mitra dari luar Polri untuk pelacakan kasus Covid-19. Senkom Mitra Polri yang jumlah anggotanya 690 orang, bisa jadi kekuatan tracer yang besar. Kita dan Senkom Mitra Polri sama-sama punya kepentingan ingin meneken Covid-19," ungkap Lukman Tri Novianto, Minggu (27/6).

Sebelumnya, Polres Karanganyar memiliki 177 tracer yang tersebar di desa dan kelurahan. Polres juga menambah 25 tracer. Sementara itu dalam pelatihan tracer yang diselenggarakan Dirbinmas Polda Jateng, para peserta menerima materi secara luring di Aula Wira

Pratama 1 dan secara daring melalui zoom meeting.

Lebih lanjut dikatakan, Senkom tidak hanya ahli tracing tetapi juga sebagai corong Polri untuk mendidik masyarakat tentang 5M, protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan. Dalam tugasnya Senkom Mitra Polri selalu bersinergi dengan tiga pilar setempat yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, dan bidan desa.

Ketua Senkom Mitra Polri Karanganyar, Joko Sutrisno menyampaikan pihaknya menargetkan 50 persen dari anggota Senkom Mitra Polri bisa menjadi tracer Covid-19. Jumlah seluruh anggota Senkom Mitra Polri ada 690 orang tersebar di seluruh wilayah Karanganyar. "Kami akan atur, matangkan lagi cara kerja mereka setelah ikut pelatihan sehingga bisa bergerak lebih cepat," ungkapnya. (Abdul Alim)

Satgas Covid-19 Banyumas Giatkan Patroli

SATGAS Covid-19 Kecamatan Baturraden Banyumas saat melakukan patroli pengamanan dan penertiban, Selasa (29/6) malam di sekitar wisata Baturraden dan Karangasalam banyak menjumpai pelanggaran. "Saat tim mendatangi warung dan toko, mendapati banyak yang belum tutup pada pukul 21.00 WIB, yakni 30 toko atau warung," kata Ketua Satgas Covid Kecamatan Baturraden, Budi Nugroho, Rabu (30/6).

Menurutnya, Tim Gabungan yang terdiri petugas Satpol Kecamatan, Polsek dan Koramil Baturraden langsung meminta mereka segera menutup warung dan toko yang diketahui masih buka. Selain menjumpai warung dan toko masih buka, tim gabungan juga menjaring

11 orang yang tidak memakai masker. Kemudian meminta sejumlah kerumunan pemuda yang sedang tongkrongan di terminal bawah Baturraden dan terminal atas Baturraden serta kompleks Desa Wisata Karangasalam Lor untuk bubar.

Kegiatan penertiban tersebut berkaitan pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai upaya pengendalian Covid-19 di Banyumas yang terus meningkat. "Dasar penertiban tersebut adalah Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/336 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Banyumas Tahap XIII Tahun 2021," terang Budi Nugroho.

(Driyanto)

Petugas Satgas Covid-19 Kecamatan Baturraden saat mendatangi warung dan kerumunan warga.

IKLAN BARIS

LES PRIVAT

Les Privat Biola, Piano, Gitar, dll. Bisa Datang ke Rumah (50-75k) Deokani Music (WA.085729894481) 3 / 00092/0621

BARANG HILANG

Hilang BPKB 2303457-G/AB 6619 MI a/n Any Prasasti Sardiyana d/a Jl Prawirotaman 46 MG Yka 3 / 01322/0621